

LKPD

Lembar Kerja Peserta Didik

**BERPIKIR KRITIS DAN SEMANGAT
MENCINTAI IPTEK**

Kelas XI/Fase F

**Pendidikan Agama Islam
dan Budi Pekerti**

**Disusun oleh :
Yastin Ismityas Septiani, S. Pd. I.**



Nama :

Kelas :

BERPIKIR KRITIS DAN CINTA IPTEK

MATERI

Perhatikan penjelasan materi tentang Berpikir kritis pada tayangan video berikut ini !



BERPIKIR KRITIS DAN CINTA IPTEK

Lembar Kerja Kelompok

Perhatikan Teks Berikut Ini !

Di tengah panasnya suhu politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ruang digital Indonesia kembali diuji dengan masifnya peredaran berita bohong atau hoaks. Salah satu kasus yang paling menonjol dan berpotensi mendelegitimasi proses demokrasi adalah isu mengenai adanya 52 juta pemilih fiktif yang disusupkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS).

• Narasi dan Penyebaran Hoaks

Kabar bohong ini mulai menyebar pada awal tahun 2024, terutama melalui platform media sosial video pendek seperti TikTok dan kemudian menyebar ke Instagram dan platform lainnya. Konten yang beredar umumnya berupa video yang menarasikan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah secara curang memasukkan 52 juta data pemilih tidak wajar ke dalam DPS untuk Pemilu 2024.

Narasi tersebut seringkali dibumbui dengan tuduhan bahwa KPU sengaja melakukan kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Untuk meyakinkan audiens, pembuat konten acap kali menyertakan potongan video atau gambar yang diklaim sebagai bukti, serta menambahkan keterangan provokatif yang menyerukan untuk "mengawal pemilu" dari kecurangan.

• Klarifikasi dan Upaya Penanganan

Menanggapi isu yang meresahkan ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan KPU bergerak cepat untuk memberikan klarifikasi. Melalui situs resmi dan berbagai kanal media, kedua lembaga pemerintah ini secara tegas menyatakan bahwa informasi mengenai 52 juta pemilih fiktif adalah hoaks.

KPU menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data pemilih dilakukan secara berjenjang dan transparan, mulai dari tingkat paling bawah hingga pusat, serta melibatkan berbagai pihak termasuk badan pengawas pemilu dan perwakilan partai politik. Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, bahkan mempertanyakan sumber data yang digunakan oleh penyebar hoaks dan menegaskan bahwa DPS merupakan data dinamis yang terus diperbaiki hingga ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kominfo, melalui unit siber-nya, bertugas untuk men-take down atau menurunkan konten-konten hoaks tersebut dari berbagai platform digital. Sepanjang periode Pemilu 2024, Kominfo melaporkan telah menangani ribuan konten hoaks terkait pemilu, termasuk isu pemilih fiktif ini.

• Dampak dan Potensi Bahaya

Meskipun telah dibantah secara resmi, hoaks mengenai 52 juta pemilih fiktif ini telanjur menimbulkan dampak di masyarakat. Dampak utamanya adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. Ketidakpercayaan ini sangat berbahaya karena dapat memicu apatisme, delegitimasi hasil pemilu, dan bahkan konflik sosial.

Disinformasi semacam ini juga berpotensi mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional. Dengan menyasar integritas proses pemilu, hoaks ini secara tidak langsung menyerang pilar utama demokrasi. Masyarakat yang terpapar informasi bohong tanpa melakukan verifikasi dapat dengan mudah terprovokasi dan terpolarisasi.

TUGAS KELOMPOK

Berdasarkan Teks Di Atas, Tentukan Beberapa Hal Berikut :

1. Berdasarkan teks, informasi penting apa yang kalian dapatkan ?

Jawaban :

2. Carilah sumber terpercaya dari internet tentang adanya berita tersebut dan jelaskan bagaimana kasus yang terjadi sebenarnya !
Cantumkan link yang kalian gunakan sebagai sumber yang relevan!

Jawaban :

3. Apa dampak yang ditimbulkan jika masyarakat mempercayai berita tersebut ?

Jawaban :

PRESENTASIKAN HASIL DISKUSI KALIAN DI DEPAN KELAS SECARA BERGANTIAN DENGAN KELOMPOK YANG LAIN !

TUGAS INDIVIDU

KERJAKAN SOAL PILIHAN GANDA PADA LINK
BERIKUT !

